



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II TA. 2025

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkala. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Disamping itu Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

Dengan disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan kiranya dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Putussibau, 7 Agustus 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199802 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN SASARAN UMUM	2
C. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA	3
D. FORMAT LAPORAN KINERJA.....	3
E. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA.....	4
F. PENGUKURAN KINERJA	4
G. INDIKATOR KINERJA	5
H. INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
I. PENGUMPULAN DATA KINERJA	5
J. SISTEMATIKA LAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	7
B. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. CAPAIAN KINERJA.....	11
B. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	12
C. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM.....	14
D. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	23
E. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN	30

BAB IV PENUTUP	42
A. KESIMPULAN.....	42
B. SARAN.....	42
TARGET DAN RELISASI KINERJA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu	9
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Ordinal	11
Tabel 3. 2 Realisasi anggaran dan capaian kinerja Sasaran Strategis Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 3. 3 Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	15
Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2025	24
Tabel 3. 5 Realisasi anggaran dan capaian kinerja Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan dan administrator di bidang perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/ bidang. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga output dan outcomenya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh

APBD Kapuas Hulu yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memfokuskan pada efisiensi, efektifitas dan dampak yang dirasakan (impact).

Pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi tentang kondisi riil pembangunan di masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tentang program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Sehingga program dan kegiatan pembangunan kedepannya sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu.

B. TUJUAN DAN SASARAN UMUM

Pelaksanaan monitoring bertujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan;
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Sedangkan sasaran dari monitoring adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara berkelanjutan mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
- b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas

Hulu Tahun Anggaran 2025 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- c. Memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat dicapai pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
- d. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

C. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. FORMAT LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan

evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

E. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

F. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

G. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

I. PENGUMPULAN DATA KINERJA

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

J. SISTEMATIKA LAPORAN

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA;
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;
4. BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan menggunakan alat berupa indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau belum.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah dicapai selama periode pembangunan.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Bappeda untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, dan telah dilakukan revisi berdasarkan assistensi MenPAN RB, yang mana pada tahun 2025 ini ada 4 (empat) Sasaran Strategis dan ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu tersebut dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	Baik
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	Persen	77,1
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	Predikat	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja BAPPEDA, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja bappeda tahun 2025 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA

Pada pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \text{REALISASI} / \text{RENCANA} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{INDIKATOR KINERJA} = \text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA} / \text{RENCANA}) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing – masing, dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan ke dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel 2 (dua) dibawah ini :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Ordinal

PERSENTASE	PREDIKAT
< 100%	Tidak tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai target
> 100%	Melebihi target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3 (tiga) dibawah ini :

Tabel 3

Tabel 3. 2 Realisasi anggaran dan capaian kinerja Sasaran Strategis Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	884.448.000	407.111.000	46,03%	Indeks Kualitas Perencanaan	Predikat	Baik		-
2.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	838.172.800	282.216.900	33,67%	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	Persen	77,1	4,73	6,13%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	120.000.000	52.944.000	44,12%	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	35%	35%
4.	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.426.600.200	2.908.068.641	45,25%	Predikat SAKIP Bappeda	Predikat	A	Dinilai thn brktnya	Dinilai thn brktnya
JUMLAH		8.269.221.000	3.650.340.541	44,14%			177,1	39,73	22,43

Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.650.340.541 atau 44,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.269.221.000. Sedangkan realisasi kinerja sasaran strategis terealisasi sebesar 39,73% dari 177,1% target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 22,43%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah” dengan Indikator Kinerja “Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD” terealisasi sebesar 4,73 % dari 77,1% target yang telah ditetapkan, dengan kata lain sudah tercapai sebesar 6,13%
2. Realisasi kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan” dengan Indikator Kinerja ‘Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti” terealisasi sebesar 35% % dari 100% target yang telah ditetapkan.

Untuk kinerja sasaran strategis yang lainnya seperti Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan belum tercapai dikarenakan sesuai dengan rencana aksi akan dilaksanakan pada triwulan 4 tahun 2025, begitu juga dengan kinerja sasaran strategis ‘Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Indikator Kinerja “PREDIKAT SAKIP” juga belum tercapai dikarenakan sesuai dengan rencana aksi akan dilaksanakan pada triwulan 4 tahun 2025.

C. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4 (empat) di bawah ini :

Tabel 3. 3 Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.103.401.000	245.157.500	46,03%	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persen	100	-	-
					Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	Persen	100	-	-
					Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	Persen	77,1	4,73	6,13%
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	838.172.800	282.216.900	33,67%	1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	Persen	100	100	100%
					1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang	Persen	100	30	30%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD				
					1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	Persen	100	35	35%
					2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD	Persen	100	100	100%
					2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Persen	100	20	20%
					2c) Persentase keselarasan muatan	Persen	100	20	20%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD				
					3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100%
					3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Persen	100	25	25%
					3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan	Persen	100	25	25%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kewilayahan dengan RKPD				
					4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	77,1	34,71	45%
					4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	Persen	77,1	22,29	29%
					4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	77,1	22,29	29%
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	120.000.000	52.944.000	44,12%	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	35	35%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan				
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.426.600.200	2.908.068.641	45,25%	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	90	Dinilai tagun berikut	-
					Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	IPKPD	99,32	44,14	44,44%
					Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	Persen	100	50	50%
					Persentase pemenuhan data kepegawaian	Persen	100	50	50%
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Persen	88	50	50%
					Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100	50	50%
					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	Persen	100	50	50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					perangkat daerah				
					Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persen	100	50	50%
	JUMLAH	8.880.905.200	3.311.295.041	44,14%			2.180	868	41,30%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.650.340.541 atau 44,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.269.221.000,-, sedangkan realisasi kinerja sudah terealisasi sebesar 868 dari 2.180 target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 41,30%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu Rp. 1.103.401.000 realisasi sebesar Rp. 245.157.500 atau 46,03% Sedangkan realisasi kinerja program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator “Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD” sudah terealisasi sebesar 4,73 % dari 77,1% target yang telah ditetapkan, dengan kata lain sudah tercapai sebesar 6,13, Sedangkan untuk indikator program lainnya sesuai rencana aksi akan dilaksanakan atau akan diukur pada triwulan IV tahun 2025.
2. Realisasi Anggaran Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu Rp. 838.172.800 realisasi sebesar Rp. 282.216.900 atau 33,67%. Sedangkan realisasi kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD sudah tercapai sebesar 100%, Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD sudah tercapai sebesar 30%, Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD sudah tercapai sebesar 35%, Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD sudah tercapai sebesar 100%, Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD sudah tercapai sebesar 20%, Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sudah tercapai sebesar 20%, Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA

OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah tercapai sebesar 100%, Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD sudah tercapai sebesar 25%, Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD sudah tercapai sebesar 25%, Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah tercapai sebesar 35%, Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam sudah tercapai sebesar 22% dan Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sudah tercapai sebesar 22%.

3. Realisasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan pagu Rp. 120.000.000 realisasi sebesar Rp. 52.944.000 atau 44,12% dengan realisasi indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan dengan capaian sebesar 35%.
4. Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp. 6.426.600.200 realisasi sebesar Rp. 2.908.068.641 atau 45,25% dengan realisasi indikator kinerja Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah sebesar 44,44%, Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD dengan capaian sebesar 50,00%, capaian Persentase pemenuhan data kepegawaian sebesar 50,00%, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal dengan capaian sebesar 56,82%, Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 50,00%, Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik dengan capaian sebesar 50,00%, sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP BAPPEDA baru bisa diketahui hasil capaiannya setelah mendapat penilaian oleh APIP Kabupaten/Inspektorat pada tahun berikutnya.

D. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Realisasi anggaran dan capaian kinerja Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 5 (lima) dibawah ini :

Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.862.000	301.221.000	39,54%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2.791	2.790	99,96%
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.530.000	43.400.000	85,89%	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	333	333	100%
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	24.556.000	16.790.000	68,37%	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	3	60%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah								
4	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	47.500.000	45.700.000	96,21%	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100%
5	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	251.812.800	105.071.000	41,73%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	14	4	29%
6	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan	277.780.000	107.811.000	38,81%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan	Dokumen	14	4	29%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
7	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	308.580.000	69.334.900	22,47%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	4	29%
8	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	60.000.000	24.332.000	40,55%	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	0	0%
9	Kegiatan :	60.000.000	28.612.000	47,69%	Jumlah	Dokumen	1	0	0%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
10	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.925.000	53.961.300	40,60%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	13	59%
11	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.058.785.162	2.225.411.147	43,99%	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	574	288	50%
12	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada	20.300.000	9.360.000	46,11%	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada	Dokumen	7	6	86%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah				Perangkat Daerah				
13	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.085.000	8.633.000	50,53%	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	9	8	89%
14	Kegiatan : Administrasi Umum	561.344.000	252.153.500	44,92%	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Dokumen	8	8	100%
15	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.690.572	310.233.394	66,19%	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	1	50%
16	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	167.470.466	48.316.300	28,85%	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	0	0%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	JUMLAH	8.269.221.000	3.650.340.541	44,14%			3.798	3.463	91,18%

Berdasarkan tabel 5 (lima) di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sudah terealisasi sebesar Rp. 3.650.340.541,- atau 44,14% dari pagu anggaran Rp. 8.269.221.000. Untuk realisasi atas capaian indikator kinerja kegiatan hingga Triwulan ini sudah terealisasi sebesar 3.463 Dokumen dari 3.798 target dokumen atau dengan capaian sebesar 91,18%. Sedangkan indikator kegiatan yang belum terealisasi hingga triwulan II Tahun 2025 terdapat 3 (Tiga) kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
3. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun penyebab kegiatan tersebut belum terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

E. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN

Realisasi Anggaran dan capaian kinerja sasaran Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 3. 5 Realisasi anggaran dan capaian kinerja Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	415.784.000	54.796.000	13,18%	Dokumen	2	2	100%
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	73.415.000	42.435.500	57,80%	Laporan	2	2	100%
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	45.408.000	43.600.000	96,02%	Laporan	2	2	100%
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	5.090.000	5.000.000	98,23%	Laporan	2	2	100%
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	49.095.000	46.950.000	95,63%	Laporan	2	2	100%
6	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	75.948.000	71.739.500	94,46%	Laporan	2780	2.780	100%
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	97.122.000	36.700.000	37,79%	Laporan	1	0	0%
8	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.930.000	0	0%	Laporan	1	1	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
9	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	46.600.000	43.400.000	93,13%	Laporan	332	332	100%
10	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2.625.000	0	0,00%	Laporan	1	1	100%
11	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	21.931.000	16.790.000	76,56%	Laporan	4	2	50%
12	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	47.500.000	45.700.000	96,21%	Dokumen	1	1	100%
13	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.745.500	23.255.000	61,61%	Dokumen	1	0	0%
14	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2.251.000		0,00%	Dokumen	1	0	0%
15	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	18.091.300	8.670.000	47,92%	Dokumen	4	2	50%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
16	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	59.628.500	6.577.000	11,03%	Laporan	1	0	0%
17	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.287.500	24.584.000	48,89%	Dokumen	1	0	0%
18	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.359.000	0	0,00%	Dokumen	1	0	0%
19	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.164.000	0	0,00%	Dokumen	4	2	50%
20	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	66.286.000	41.985.000	63,34%	Laporan	1	0	0%
21	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.803.500	5.550.000	18,02%	Dokumen	1	0	0%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
22	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.457.000		0,00%	Dokumen	1	0	0%
23	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	33.850.000	16.470.000	48,66%	Dokumen	4	2	50%
24	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	56.896.000		0,00%	Laporan	1	0	0%
25	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.501.000	18.240.000	45,04%	Dokumen	1	0	0%
26	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.922.000		0,00%	Dokumen	1	0	0%
27	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	41.408.000	22.440.000	54,19%	Dokumen	4	2	50%
28	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	70.942.500	45.111.000	63,59%	Laporan	1	0	0%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							
29	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.411.500	0	24,79%	Dokumen	1	0	0%
30	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.685.000	0	0,00%	Dokumen	1	0	0%
31	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.412.500	5.170.000	26,63%	Dokumen	4	2	50%
32	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	64.268.000	13.214.900	20,56%	Laporan	1	0	0%
33	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.468.000	14.141.000	26,95%	Dokumen	1	0	0%
34	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4.494.000	0	0,00%	Dokumen	1	0	0%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Bidang Kewilayahan							
35	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.560.000	6.210.000	26,36%	Dokumen	4	2	50%
36	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	79.281.000	15.375.000	19,39%	Laporan	1	0	0%
37	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	60.000.000	24.332.000	40,55%	Laporan	1	0	0%
38	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	60.000.000	28.612.000	47,69%	Laporan	1	0	0%
39	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.910.000	3.750.000	37,84%	Dokumen	4	2	50%
40	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.589.000		0,00%	Dokumen	2	2	100%
41	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.210.000	1.950.000	31,40%	Dokumen	2	1	50%
42	Sub Kegiatan : Koordinasi dan	8.323.000	5.750.000	69,09%	Dokumen	2	2	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Penyusunan DPA-SKPD							
43	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.073.000		0,00%	Dokumen	2	1	50%
44	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.502.000	1.950.000	13,45%	Laporan	3	2	67%
45	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.318.000	40.561.300	51,14%	Laporan	7	3	43%
46	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.780.311.162	2.120.521.147	44,36%	Orang/bulan	532	266	50%
47	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	244.429.000	97.385.000	39,84%	Dokumen	9	5	56%
48	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.300.000	770.000	7,48%	Dokumen	14	7	50%
49	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.544.000	2.960.000	65,14%	Dokumen	1	0	0%
50	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.779.000	2.725.000	31,04%	Dokumen	1	0	0%
51	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.422.000	1.050.000	10,07%	Dokumen	17	10	56%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
52	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	1.036.000	51,80%	Unit	1	1	100%
53	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000	1.888.000	47,20%	Dokumen	1	1	100%
54	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	829.000	33,16%	Laporan	1	1	100%
55	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.300.000	2.439.000	38,71%	Laporan	1	1	100%
56	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	1.380.000	55,20%	Laporan	2	1	50%
57	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	1.788.000	59,60%	Laporan	1	1	100%
58	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.370.000	2.153.000	63,89%	Unit	1	1	100%
59	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00%	Paket	1	1	100%
60	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000	788.000	26,27%	Dokumen	1	1	100%
61	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.515.000	1.586.000	63,06%	Dokumen	1	1	100%
62	Sub Kegiatan : Monitoring,	8.200.000	4.106.000	50,07%	Dokumen	4	3	75%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
63	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0%	Orang	1	0	0
64	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.199.000	9.785.000	68,91%	Paket	1	1	100%
65	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.104.000	7.680.000	21,88%	Paket	1	1	100%
66	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.985.000	26.307.500	49,65%	Paket	1	1	100%
67	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	24.371.000	10.883.000	44,66%	Paket	1	1	100%
68	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.185.000	184.303.000	50,75%	Laporan	1	1	100%
69	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.940.000	2.100.000	15,06%	Dokumen	1	1	100%
70	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.480.000	7.635.000	27,78%	Dokumen	1	1	100%
71	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.137.734	47.217.146	36,85%	Laporan	1	1	100%
72	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.552.838	263.016.248	77,23%	Laporan	1	0	0%
73	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	143.110.466	30.116.300	21,04%	Unit	1	0	0%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
74	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.360.000	18.200.000	74,71%	Unit	1	0	0%
	JUMLAH	8.269.221.000	3.650.340.541	44,14%		3.798	3.463	91,18%

Berdasarkan tabel 6 (enam) di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Sub Kegiatan hingga Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 3.650.340.541 atau 44,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.269.221.000, sedangkan capaian kinerja Sub Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 3.463 dokumen atau 91,18% dari target 3.798 dokumen dengan capaian sebesar 91,18%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.650.340.541 atau 44,14% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 8.269.221.000 dengan rata-rata capaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

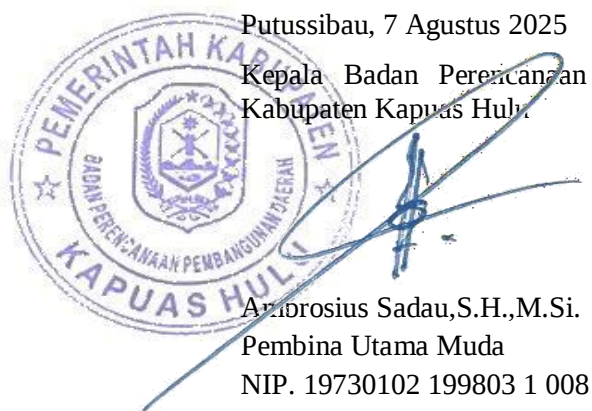
1. Rata – rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 22,43%;
2. Rata - rata capaian indikator kinerja Program 41,02%;
3. Rata - rata capaian indikator kinerja Kegiatan 91,18%;
4. Rata - rata capaian indikator kinerja Sub Kegiatan 91,18%.

B. SARAN

Saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja pada Triwulan berikutnya antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan pencapaian target kinerja terutama untuk percepatan pencapaian kinerja Sasaran Strategis dan capaian target kinerja Program ;
2. Segera melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Eksternal terhadap Organisasi Perangkat Daerah;
3. Mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target kinerja pada rencana aksi Tahun 2025.

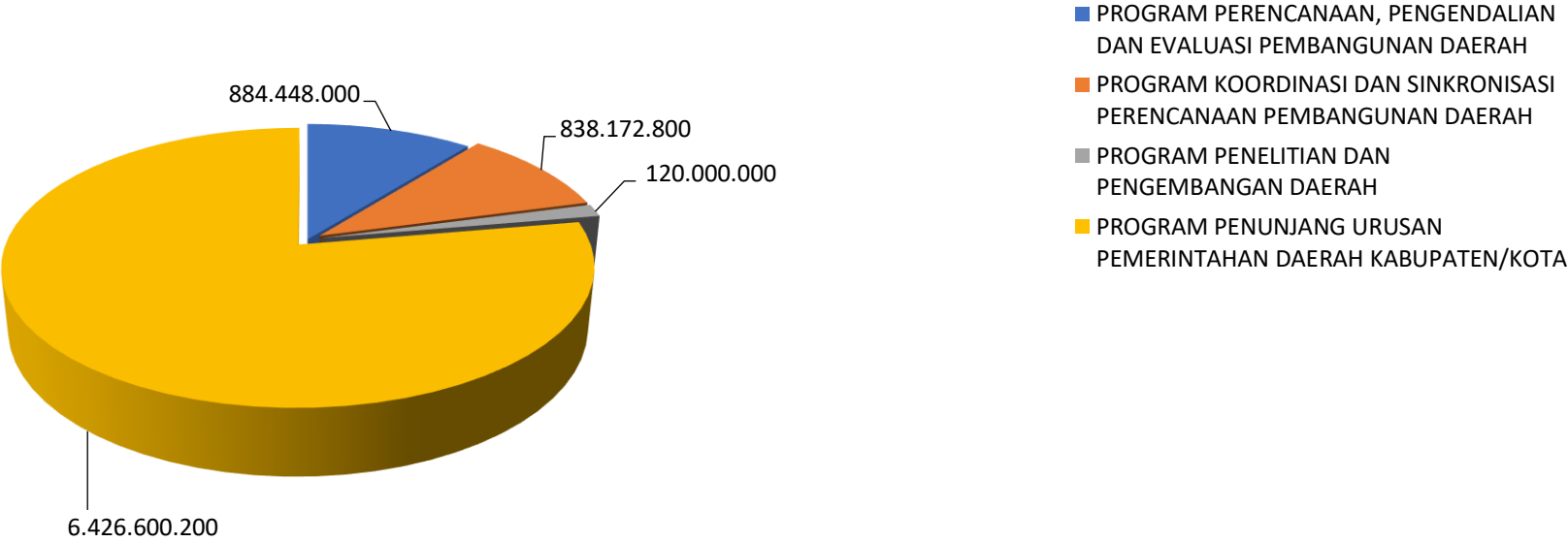
Putussibau, 7 Agustus 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

LAMPIRAN

REALISASI BERDASARKAN PROGRAM

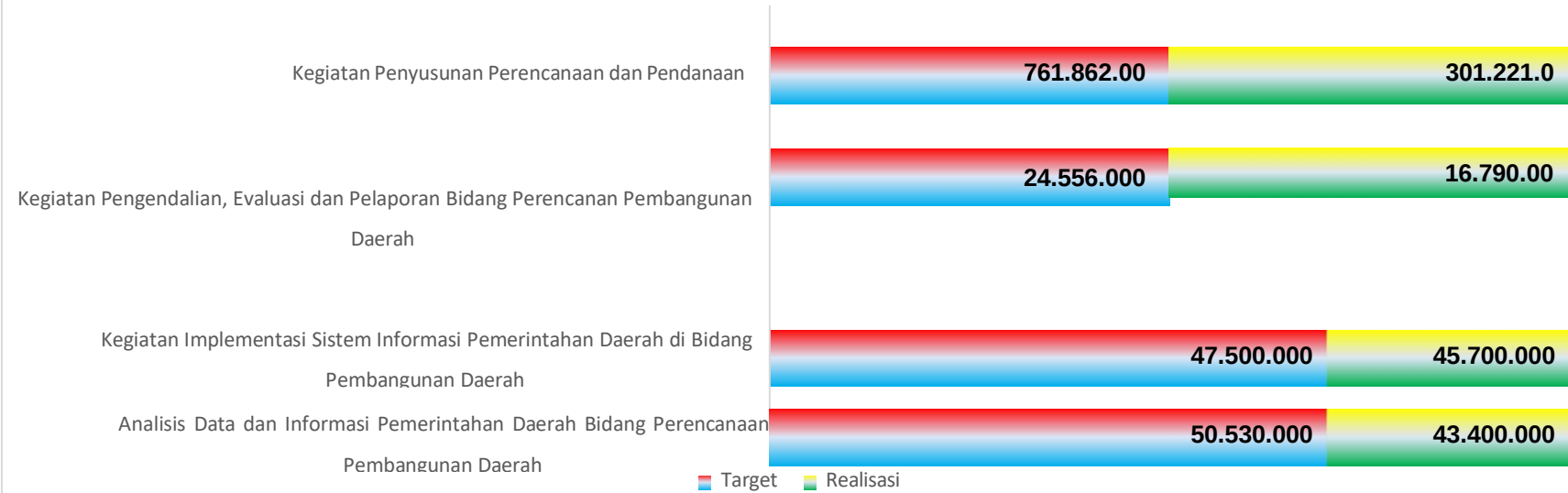


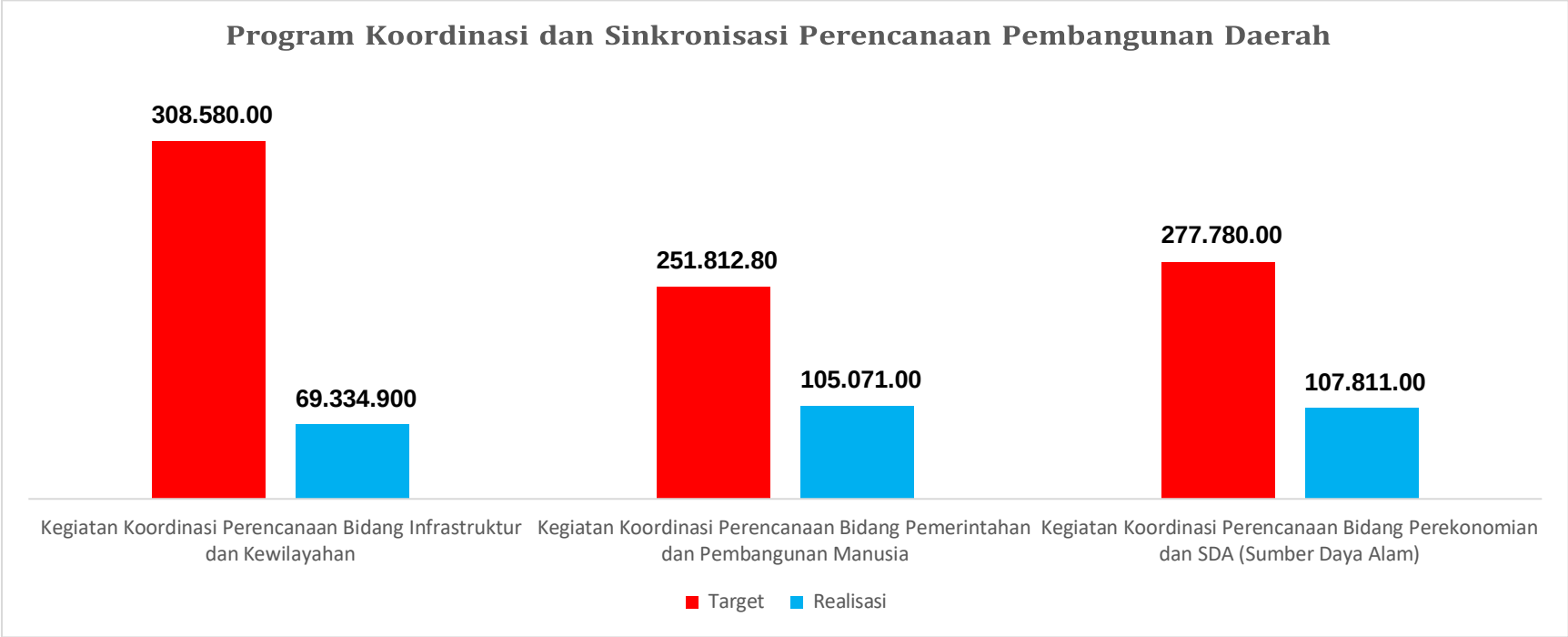
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

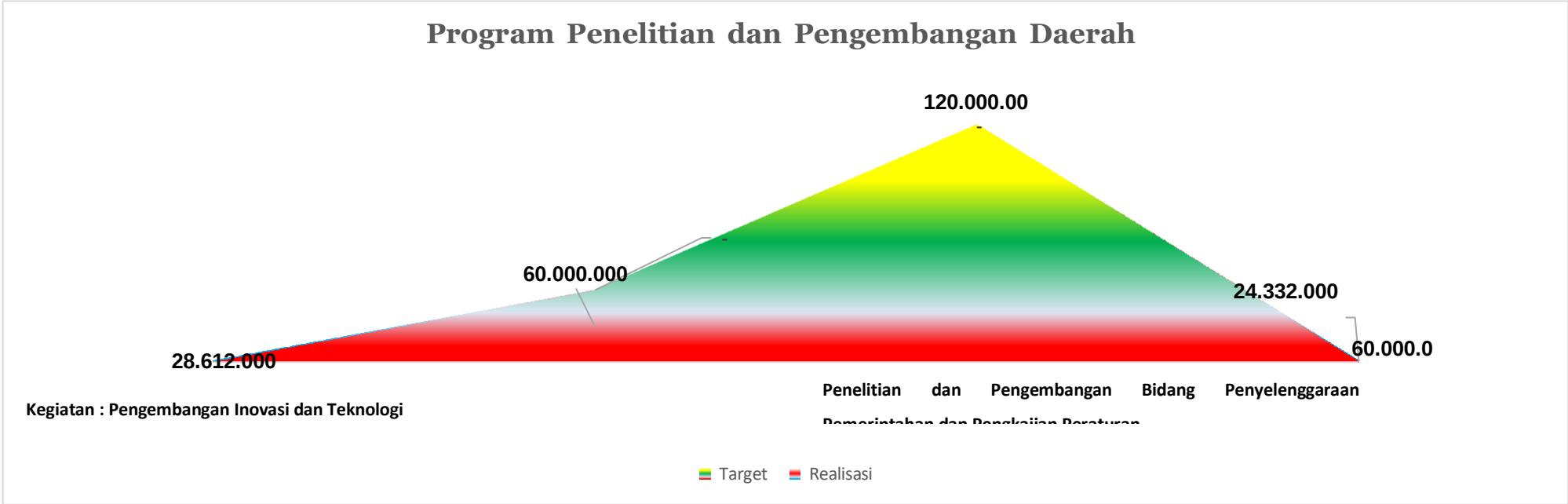


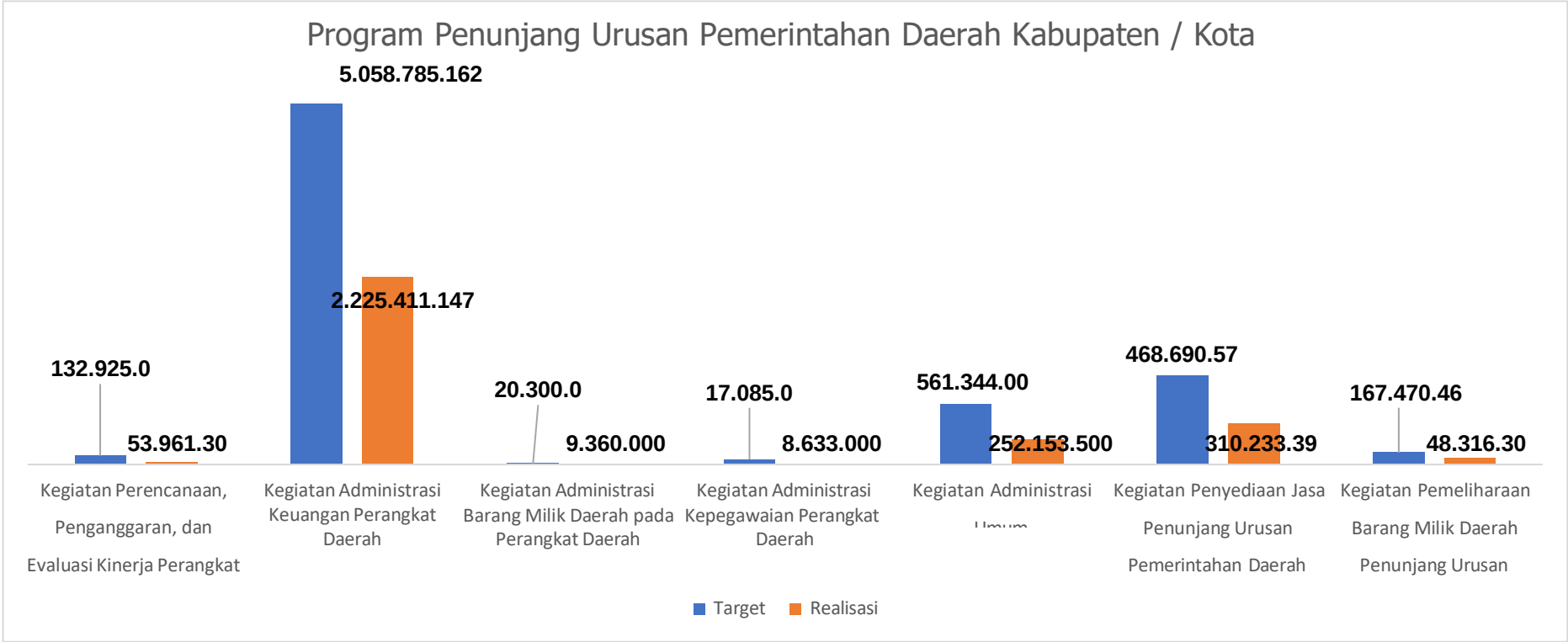
TARGET DAN RELISASI KINERJA

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah









**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fransiskus Diaan, S.H.,M.H.
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 April 2025

Pihak Kedua,
Bupati Kapuas Hulu,



Fransiskus Diaan, S.H.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kapuas Hulu

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	77,1%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian Pengembangan Hasil dan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.426.600.200	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	884.448.000	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	838.172.800	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan	120.000.000	APBD
Jumlah		8.269.221.000	

Pihak Kedua,
 Bupati Kapuas Hulu



Fransiskus Diaan, S.H.,M.H.

Putussibau, 24 April 2025
 Pihak Pertama,
 Kepala BAPPEDA
 Kabupaten Kapuas Hulu

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730102 199803 1 008

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy, S.T., M.T.
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 April 2025

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA

Dedy, S.T., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19750506 200401 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BAPPEDA	1. Nilai SAKIP BAPPEDA 2. Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD 4. Persentase pemenuhan data kepegawaian 5. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal 6. Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah 7. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah 8. Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	1. 90 2. 99,32 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 88 6. 100 % 7. 100 % 8. 100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.426.600.200
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.925.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.058.785.162
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.300.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.085.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.344.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.690.572
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.470.466
	Jumlah	6.426.600.200

Pihak Kedua
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 24 April 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA

Dedy, S.T., M.T.
Pembina Tk.I
NIP. 19750506 200401 1 001

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA, DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Darmanta, S.T.,M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, dan
Pengembangan Wilayah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 April 2025

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,

Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana
dan Pengembangan Wilayah

Agus Darmanta, S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA, DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD; 2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD; 3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 77,1 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	838.172.800
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	308.580.000
Jumlah		308.580.000

Putussibau, 24 April 2025

Pihak Kedua,

Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,

Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Agus Darmanta, S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : C.Jimmy.J., SP.,M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 24 April 2025

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

C. Jimmy.J.,SP.,M.Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD; 2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RKPD; 3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 77,1 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	838.172.800
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	277.780.000
Jumlah		277.780.000

Putussibau, 24 April 2025

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA


Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan
Perekonomian


C. Jimmy J., SP., M. Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 April 2025

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008



Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan
Budaya BAPPEDA

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19900923 201402 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD; 2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD; 3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 77,1 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	838.172.800
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	251.812.800
	Jumlah	251.812.800

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 24 April 2025
Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19900923 201402 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriadie Syafa'ad, S.Kom., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008



Putussibau, 24 April 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian,
Penelitian dan Pengembangan

Eka Fitriadie Syafa'ad, S.Kom., M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, partisipatif dan aplikatif	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD; 2. Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	1. 100 % 2. 100 %
2	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	77,1 %
3	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	844.448.000
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	761.862.000
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	50.530.000
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	24.556.000
1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	47.500.000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	120.000.000
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	60.000.000
2.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	60.000.000
	Jumlah	1.004.448.000

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 24 April 2025
Pihak pertama,
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Eka Fitriadie Syafa'ad, S.Kom., M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9)= 5+6+7+8	10 (9/4*100)%	11	12
	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A							Akan dinilai pd tahun berikutnya	


Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA


Dedy, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750506 200401 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TRIWULAN II TAHUN 2025 SEKRETARIAT							
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	84	0	akan dinilai pada tahun berikutnya	akan dinilai pd thn berikutnya
		Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	IPKPD	99,32	44	44%	
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	Persen	100	50	50%	
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	Persen	100	50	50%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Persen	88	50	57%	
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persen	100	50	50%	
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persen	100	50	50%	
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	13	59%	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	25%	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100%	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1	50%	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100%	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	2	1	50%	

		Dokumen Perubahan DPA- SKPD					
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	2	67%	
7	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	3	43%	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	574	288	50%	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	532	226	50%	
2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	5	56%	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	7	50%	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0%	
5	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0%	
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	10	59%	
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	6	86%	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan	Jumlah Rencana Kebutuhan	Unit	1	1	100%	

	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD					
2	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100%	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	100%	
4	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	
5	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1	50%	
6	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100%	
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	9	8	89%	
1	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	100%	
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100%	
3	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100%	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100%	
5	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3	75%	
6	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Peltihan	Orang	1	1	100%	

5	Kegiatan : Administrasi Umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Dokumen	8	8	100%	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%	
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100%	
6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100%	
7	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100%	
8	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100%	
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	1	50%	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100%	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0%	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	0	0%	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	1	0	0%	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0%	
	JUMLAH			624	324	52%	

Putussibau, 28 Juli 2025

Sekretaris BAPPEDA



Dedy, S.T., M.T.
Pembina

NIP. 19750506 200401 1 001



Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9)= 5+6+7+8	10 (9/4*100)%	11	12
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	0	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	77,1	0	4,73	-	-	4,73	6,13%		
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan	100	0	35	-	-	35	35%		



Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025

Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Eka Fitriadi Syafa'ad, S.Kom, S.Kom., M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TRIWULAN II TAHUN 2025 BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persentase	100	0	-	
		Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	Persentase	100	0	-	
		Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggara n Pemerintah Daerah pada RKPD	Persentase	77,1	4,73	6,13%	
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	Persen	35	35%	
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2.791	2.790	100	
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	100%	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	2	100%	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100%	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	2	2	100%	
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100%	
6	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2780	2780	100%	
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	0	0%	

		(RPJPD/RPJMD/ RKPD)					
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	333	333	100	
1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	100%	
2	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	332	332	100%	
2	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	3	60%	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	100%	
2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	2	50%	
3	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100%	
1	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	
4	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan	Dokumen	1	0	0%	

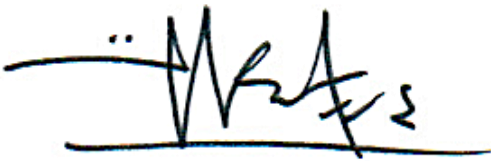
	Pengkajian Peraturan	dan Pengkajian Peraturan					
1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	0	0%	
5	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	0	0%	
1	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	0	0%	
	JUMLAH			3.132	3.127	99,84%	

Putussibau, 28 Juli 2025

Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembang

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008


Eka Fitriadi Syafa'ad, S.Kom, S.Kom., M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9)= 5+6+7+8	10 (9/4*100)%	11	12
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	0	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	77,1	-	4,73	-	-	4,73	6,13%		



Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19900923 201402 1 003

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TRIWULAN II TAHUN 2025 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA							
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1a) Presentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;	Laporan	100	100	100%	
		2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD;	Laporan	100	100	100%	
		3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	Laporan	100	100	100%	
		4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Laporan	77,1	34,71	45,02%	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	14	4	29%	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0%	
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	1	0	0%	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang	Laporan	4	2	50%	

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan					
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	0	0%	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0%	
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	0	0%	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	2	50%	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	0	0%	
	JUMLAH			14	4	29%	

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA



Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Penata
NIP. 19900923 201402 1 003

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
 BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9)= 5+6+7+8	10 (9/4*100)%	11	12
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	0	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	77,1	0	4,73	-	-	4,73	6,13%		

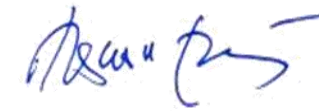
Putussibau, 28 Juli 2025

Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008



Agus Darmanta, S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TRIWULAN II TAHUN 2025
BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	Laporan	100	35	35%	
		2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Laporan	100	20	20%	
		3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Laporan	100	25	25%	
		4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	77,1	22,29	29%	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	4	29%	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0	
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	2	50%	

4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan	1	0	0	
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	0	0	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	2	50%	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	0	0%	
	JUMLAH			14	4	29%	

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025

Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah



Agus Darmanta, S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
 BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9)= 5+6+7+8	$\frac{10}{(9/4 \times 100)}\%$	11	12
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	0	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	77,1	0	4,73	-	-	4,73	6,13%		



Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

C. Jimmy J., S.P., M.Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TRIWULAN II TAHUN 2025 BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN							
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	Laporan	100	30	30%	
		2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Laporan	100	20	20%	
		3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Laporan	100	25	25%	
		4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	Laporan	77,1	22,29	29%	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	14	4	29%	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0%	
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	1	0	0%	

	Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	2	50%	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	0	0%	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	0	0%	
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	0	0%	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	2	50%	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	Laporan	1	0	0%	

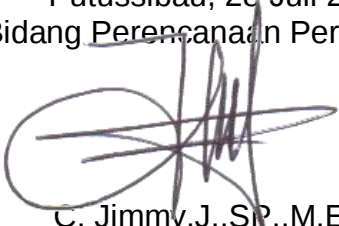
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA					
	JUMLAH			14	4	29%	

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 28 Juli 2025
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian



C. Jimmy.J.,SP.,M.Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN II T.A 2025

Pada Hari Kamis, 7 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : Dedy, S.T., M.T.
NIP : 19750506 200401 1 001
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2 April sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II T.A. 2025) dengan hasil sebagai berikut:

I. ALOKASI APBD TAHUN 2025

Alokasi APBD Tahun 2025 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 6.426.600.200,- (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai 1 (Satu) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran belanja daerah Tahun 2025 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II sebesar Rp2.908.068.641,- (*Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) dari anggaran Rp. 6.426.600.200,- (*Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau 45,25%.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025, jumlah target sebesar 625 Dokumen, realisasinya sebesar 325 Dokumen atau 52%.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di digunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 7 Agustus 2025
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Dedy, S.T., M.T.
NIP. 19750506 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id; Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN II T.A 2025**

Pada Hari Kamis, 7 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.

NIP : 19730102 199803 1 008

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

2. Nama : Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P.

NIP : 19830712 201101 1 004

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2 April sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II T.A. 2025) dengan hasil sebagai berikut:

I. ALOKASI APBD TAHUN 2025

Alokasi APBD Tahun 2025 pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 1.004.448.000,- (*Satu Miliar Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai 2 (Dua) Program dengan 6 (Enam) Kegiatan.

II. REALISASI ANGGARAN

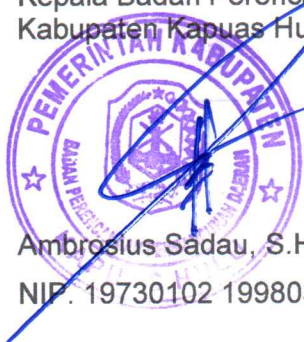
Realisasi Anggaran belanja daerah Tahun 2025 Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 460.055.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) dari anggaran Rp Rp 1.004.448.000,- (*Satu Miliar Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau 45,80%.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025, jumlah target sebesar 3.130 Dokumen, realisasinya sebesar 3.127 Dokumen atau 99,90%.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.

NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 7 Agustus 2025
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan
Pengembangan
Kabupaten Kapuas Hulu

Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P.

NIP. 19830712 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN II T.A 2025

Pada Hari Kamis, 7 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : Agus Darmanta, S.T., M.T.
NIP : 19700809 200003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan

Wilayah

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2 April sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II T.A. 2025) dengan hasil sebagai berikut:

I. ALOKASI APBD TAHUN 2025

Alokasi APBD Tahun 2025 pada Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 308.580.000,- (*Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai 1 (Satu) Kegiatan.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran belanja daerah Tahun 2025 Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp69.334.900,- (*Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dari anggaran Rp 308.580.000,- (*Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) atau 22,47%.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025, jumlah target sebesar 14 (Empat Belas) Dokumen, realisasinya sebesar 4 (Empat) Dokumen atau 29%.

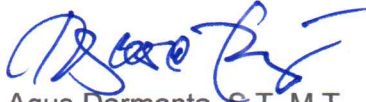
Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008



Putussibau, 7 Agustus 2025
Kepala Bidang Perencanaan Fisik
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu


Agus Darmanta, S.T., M.T.
NIP. 19700809 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU PERIODE
TRIWULAN II T.A 2025**

Pada Hari Kamis, 7 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : C.Jimmy.J.SP.,M.Eng.
NIP : 19760730 200502 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2 April sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II T.A. 2025) dengan hasil sebagai berikut:

I. ALOKASI APBD TAHUN 2025

Alokasi APBD Tahun 2025 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 277.780.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai 1 (Satu) Kegiatan.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran belanja daerah Tahun 2025 Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 107.811.000,- (*Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) dari anggaran Rp 277.780.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) atau 38,81%.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025, jumlah target sebesar 14 Dokumen, realisasinya sebesar 4 (Empat) Dokumen atau 29%.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui
Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 7 Agustus 2025
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

C.Jimmy.J.SP.,M.Eng.
NIP. 19760730 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id; Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN II T.A 2025**

Pada Hari Kamis, 7 Agustus 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP : 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP : 19900923 201402 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2 April sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan II T.A. 2025) dengan hasil sebagai berikut:

I. ALOKASI APBD TAHUN 2025

Alokasi APBD Tahun 2025 pada Bidang Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 251.812.800,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai 1 (Satu) Kegiatan.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran belanja daerah Tahun 2025 Bidang Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 105.071.000,- (*Seratus Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) dari anggaran Rp 251.812.800,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau 41,73%.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan Bidang Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan II Tahun 2025, jumlah target sebesar 14 Dokumen, realisasinya sebesar 4 (Empat) Dokumen atau 29%.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di gunakan

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008



Putussibau, 7 Agustus 2025
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP. 19900923 201402 1 003

**NOTULEN RAPAT**

Tanggal : 7 Agustus 2025
Pukul : 09.30 – selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala BAPPEDA
Acara : Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peserta Rapat : 1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian;
3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
4. Kasubbag Program;
5. Kasubbag Umpar
6. JF di lingkungan BAPPEDA;
7. Staf di lingkungan BAPPEDA.

Hasil rapat :

1. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II tahun 2025 atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing – masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu, dimana dari 4 (Empat) Program yang terjabarkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, capaian Kinerja sangat Tinggi (ST), yaitu sebesar 91,18% sedangkan Realisasi Anggaran mencapai 44,14%;
2. Agar setiap unit kerja/bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu menyampaikan Pengukuran Kinerja (Kurkin) kepada Sub Bagian Program tiap akhir triwulan, hal ini perlu dilakukan mengingat masih terdapat beberapa unit kerja/bidang di lingkungan BAPPEDA yang hasil pengukuran kinerja/capaian kinerjanya masih dalam proses karena masih menunggu data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diampu. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengkonfirmasi kembali ke OPD yang bersangkutan agar segera menyampaikan data dukung sehingga mempermudah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kedepannya, dengan kata lain setiap unit kerja/bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu harus mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya mengingat masih ada beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan data pencapaianrealisasi kinerja indikator sasaran.
3. Agar setiap unit kerja/bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu menyelenggarakan atau melakukan Monitoring dan Evaluasi eksternal terlebih dahulu untuk mendapatkan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diampu dan selanjutnya baru akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu;

Demikian Notulen Rapat ini dibuat, agar menjadi bahan/catatan perbaikan pada triwulan selanjutnya.

Notulen,

Andreas Anjas, S.Ak

NIP. 19810815 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
Dari : Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
Tanggal : 28 Juli 2025
Nomor : 000.3.6 / ~~537~~ /BAPPEDA/SET-A
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Triwulan II Tahun 2025

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal Triwulan II Tahun 2025 di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, untuk perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas mohon bantuan dan kerjasama setiap Bidang/Unit Kerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat menyampaikan Laporan Kinerja Bidang / Form Pengukuran Kinerja Kegiatan.
3. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) seperti yang disebutkan pada poin 2 (dua) di atas dapat diunduh pada web dengan alamat : <https://tally.so/r/wLb641>;

4. Laporan Kinerja Bidang/Form Pengukuran Kinerja Kegiatan tersebut disampaikan kepada Sub Bagian Program paling lambat tanggal 31 Juli 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199802 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 4 Agustus 2025

Nomor : 000.3.6 / 592 /BAPPEDA/SET-A
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Yth. (Daftar terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya percepatan pencapaian Kinerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas serta menindaklanjuti Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 000.3.6/574/BAPPEDA/SET-A tanggal 28 Juli 2025 tentang permintaan pengisian Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Triwulan II tahun 2025, berkenaan dengan hal tersebut maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 7 Agustus 2025
Waktu : 09:30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Bappeda
Triwulan II tahun 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Lampiran I Surat Nomor : 000.3.6 / 592./ BAPPEDA/SET-A
Tanggal : 4 Agustus 2025
Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
4. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Lampiran II Surat Nomor : 000.3.6 / 592 / BAPPEDA/SET-A
 ALUR / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INTERNAL BAPPEDA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala SKPD	SUBBAG PROGRAM	SEKRETARIS/KABID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala SKPD Membuka acara Rapat MonevKin Internal BAPPEDA					5 Menit		
2	Subbag Program Memaparkan Kurkin / hasil MonevKin Internal BAPPEDA				Renja/Renstra, RKA/DPA, SPJ Fungsional, Kurkin, ev Renja	25 Menit	Laporan Monev	
3	Sekretaris/ Kepala Bidang menanggapi atau memberi masukan atas paparan Kurkin dari Subbag Program				Kurkin /ev renja	10 Menit		
4	Arahan dari Kepala SKPD sekaligus menutup acara Rapat Monev					10 Menit		

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Kapuas Hulu,



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730102 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor SOP	20/SOP/BAPPEDA-KH/2025
Tanggal Pembuatan	7 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	8 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
	Ambrosius Sadau, S.H., M.Si NIP. 19730102 199803 1 008
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama SOP
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 3. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mendukung kelancaran evaluasi internal SAKIP 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026	1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik; 2. Sekretaris : Eselon III.b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik 3. Kabid : Eselon III.a, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik 4. Ka. Subbag Program : S1 diutamakan Ekonomi, Hukum 5. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan Akuntansi, D-3 Administrasi Perkantoran, S1 diutamakan Ekonomi, Hukum
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Rencana Kerja	1. Renja/Renstra
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	2. RKA/DPA
Peringatan	3. Laporan Keuangan
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka Penilaian SAKIP tidak bisa dilaksanakan.	4. Penetapan Kinerja BAPPEDA
	5. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan
	6. Alat Tulis Kantor / Komputer/Laptop
	Pencatatan dan Pendataan
	dilaporkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi (Money)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

DAFTAR HADIR

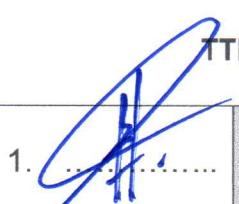
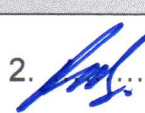
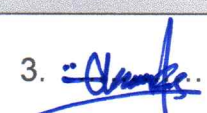
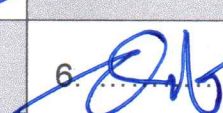
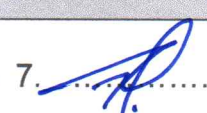
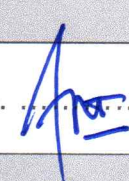
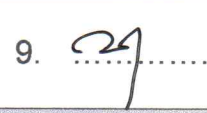
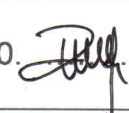
Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2025

Waktu : Pukul 09.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala BAPPEDA

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TTD	
1	AMBROSIOUS SADAU	19730102 199803 1008	KEPALA BAPPEDA	1. 	
2	DERY	197505062009011001	SEKRETARIS	2. 	
3	EKA FITRIADIE-S	198307122011011004	KABID P3	3. 	
4	C. Jimmy. J	19760730 200502001	Kabid ekon	4. 	
5	Agus Darmanta	197008092000031005	Kabid Papan	5. 	
6	Kristoforus Orlando	199009232019021003	Kabid sosbud	6. 	
7	Andreas Arjas	198108152000121002	Kasubag program	7. 	
8	Mam Satria.	19871118 2015021003	Penelaah Tdang Kebiasaan	8. 	
9	Matheus	19770327 1999031002	Staf	9. 	
10.	Silviana Kristi	19970917 202203 2012	Staf	10. 	

11	Mansur . Z	—	Stat Progra	11. 	
12	Sugeng . P	199709262025041003	Stat Progra		12. 
				13.	
					14.
				15.	
					16.
				17.	
					18.
				19.	
					20.
				21.	
					22.
				23.	
					24.
				25.	

**DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II BAPPEDA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**





 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	Nomor SOP	19/SOP/BAPPEDA-KH/2025
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	06 Januari 2025
	Disahkan oleh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGISIAN PENGUKURAN KINERJA (KURKIN) & MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mendukung kelancaran evaluasi internal SAKIP 4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026	1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik. 2. Sekretaris : Eselon III.a, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik. 3. Ka. Subbag Perencanaan : S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum 4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Ekonomi, Hukum Peralatan/Perlengkapan 1. Renja/Renstra 2. RKA/DPA 3. Laporan Keuangan/ SPJ Fungsional 4. Penetapan Kinerja BAPPEDA 5. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan 6. Alat Tulis Kantor / Komputer/Laptop	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka Penilaian SAKIP tidak bisa dilaksanakan.	dilaporkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu


 Andrius Sadau, S.H., M.Si
 NID. 19730102 199803 1 008

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA (KURKIN) & MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KABAN/SEKBAN	MUTU BAKU			KET
		SUB BAG PROGRAM	BIDANG/SEKRETARIAT		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Subbag Program mengupload file Pengukuran Kinerja (Kurkin) melalui web SI_CANDA@Bappeda;	START			Nota Dinas	5 menit		File Pengukuran Kinerja (Kurkin) diunduh melalui web dgn alamat : https://tally.so/r/wLb641
2	Masing-masing Bidang Menginput/mengisi Pengukuran Kinerja (Kurkin) melalui web SI_CANDA@Bappeda dgn alamat : https://tally.so/r/wLb641		Menginput KURKIN		File Pengukuran Kinerja (Kurkin)	120 menit	Kurkin	File Pengukuran Kinerja (Kurkin) diunduh melalui web dgn alamat : https://tally.so/r/wLb641
3	Subbag Program melakukan perekapan atas kurkin yang sudah diisi oleh masing-masing bidang				Nota Dinas, Kurkin, Renja/Renstra, RKA/DPA, Laporan Keuangan, SPJ Fungsional	120 menit	Kurkin	
4	Menyampaikan Undangan Monev ke bidang dan Menyiapkan Dokumen Monitoring & Evaluasi (MONEV)	Doc monev & undangan	undangan		undangan	10 menit		
5	Melaksanakan Rapat Monitoring & Evaluasi (MONEV) Kinerja				Kurkin	30 menit		
6	Mengarsipkan dokumen hasil rapat Monitoring & Eluasi (MONEV)	END			Kurkin	10 menit	LAPORAN MONEV	


 Kabupaten Kapuas Hulu
 Kepala Dinas
 Agusrius Sadau, S.H., M.Si
 NIP. 19730102 199803 1 008